

# **BAB 1**

## **PEDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada saat ini perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat serta mampu berkembang atau tidak, tergantung pada cara mengelola keuangannya. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan membuat aset daerah terjaga juga keutuhannya. (Setiani & Madila, 2019)

Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara lebih lanjut memperjelas bahwa laporan keuangan dimaksud harus disusun berdasarkan proses akuntansi yang wajib dilaksanakan oleh setiap pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran serta pengelola bendahara umum negara/daerah. Oleh karena itu, pemerintah pusat maupun setiap pemerintah daerah perlu menyelenggarakan akuntansi dalam suatu sistem yang pedomannya ditetapkan oleh menteri keuangan untuk lingkungan pemerintah pusat dan menteri dalam negeri untuk lingkungan pemerintah daerah. Peraturan pemerintah ini menjadi landasan bagi penyelenggaraan kegiatan akuntansi mulai dari satuan kerja pengguna anggaran, penyusun laporan keuangan oleh entitas pelaporan dan penyajian kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk diaudit, hingga penyampaian rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD. Namun, segala hal yang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD oleh legislatif atau penggunaan laporan tersebut oleh pihak-pihak terkait tidak cakup pengaturannya dalam peraturan pemerintah ini. (Honga & Ilat, 2014)

Analisis rasio keuangan merupakan perbandingan antara dua angka yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan. Analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk menginterpretasikan perkembangan kinerja dari

tahun ke tahun dan membandingkan dengan kinerja organisasi lain yang sejenis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mendefinisikan pendapatan sebagai semua penerimaan rekening kas umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Secara umum pendapatan dapat dipahami sebagai hak pemerintah daerah yang menambah kekayaan bersih yang terjadi akibat transaksi masa lalu. Melalui Laporan Realisasi Anggaran, analisis pendapatan daerah dapat dilakukan dengan cara menghitung Analisis Varians (selisih) Anggaran Pendapatan, menghitung Pertumbuhan Pendapatan Daerah dan menghitung rasio keuangan. (Ula & Bharata, 2022)

Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan alat dalam menentukan pendapatan dan pengeluaran, implementasi dari perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya, otorisasi pengeluaran, sumber pengembangan ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memobilisasi pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Perencanaan APBD sebagai terwujudnya keseluruhan aktivitas dan kegiatan pemerintah untuk menuntut adanya partisipasi aktif yang menumpang berbagai aspirasi masyarakat sehingga akan memaparkan kebutuhan nyata masyarakat, seperti yang telah tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah disusun.

Sebagaimana menurut James B. Whittaker (1995) dalam *government performance and result act, a mandate for strategic planning and performance measurement* menyatakan bahwa pengukuran atau penilain kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Terdapat unsur akuntabilitas dalam *good governance* yang baik, dimana pemerintah diharapkan dapat melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan agar masyarakat dapat menilai. Beberapa rasio yang dapat digunakan diantaranya yaitu rasio, rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi

Rasio kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari

pinjaman. Rasio kemandirian bertujuan untuk menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah

Rasio efektifitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas berada pada kategori efektif apabila rasio yang dicapai sebesar 1(satu) atau 100%. Semakin tinggi rasio efektifitas memberikan makna bahwa kemampuan daerah semakin baik.

Rasio efisiensi keuangan daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisiensi apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi keuangan daerah berarti kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik.

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Provinsi Riau menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau sebagai bentuk laporan Pertanggungjawaban dari suatu Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD).

Berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Riau dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa program/kegiatan berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan *output*.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Riau merupakan badan daerah yang memegang peran dan fungsi strategis di bidang pengelolaan keuangan,

pendapatan dan aset daerah provinsi riau. Hal ini didukung oleh data tabel 1 mengenai target anggaran dan realisasi pendapatan daerah provinsi riau sebagai berikut:

**Tabel 1. 1 Anggaran dan Realisasi Pemerintah Provinsi Riau**

Tahun	Target PAD	Realisasi	(%)
2018	3.963.964.459.139,25	3.638.995.740.121,15	91,80%
2019	3.609.065.922.066,65	3.558.210.585.339,97	98,59%
2020	3.316.666,329.545,05	3.333.176.032.497,57	100,50%
2021	4.014.678.028.946,00	4.050.468.561.143,44	100,89%

*Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau, (2022)*

Pada tabel di atas dapat dilihat target dan realisasi APBD, menunjukkan bahwa pendapatan pemerintah daerah provinsi riau setiap tahun nya mengalami peningkatan pencapaian realisasi dari target PAD yang ditetapkan. Pada tahun 2018 persentase anggaran mencapai 91,80%. Kemudian ditahun 2019 mengalami peningkatan yang persentasenya mencapai 98,59% dan di tahun 2020 persentase meningkat kembali sebesar 100,50%. Pencapaian tertinggi terjadi pada tahun 2021 yang mengalami peningkatan persentase sebesar 100,89%.

Hal ini sejalan dengan teori yang mengatakan bahwa kinerja anggaran pendapatan dikatakan baik apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang di anggarkan (target anggaran). Sebaliknya, apabila realisasi pendapatan dibawah jumlah yang dianggarkan, maka hal ini dinilai kurang baik. (Ramadani & Suyatin, 2021).

Provinsi Riau Berhasil memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Predikat ini didapatkan dengan kriteria sistem pengendalian internal memadai, dan tidak ada terdapat salah saji yang material pada audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021 untuk ke 10 kali nya berturut-turut sejak tahun 2012. Untuk itu menunjukkan komitmen dan upaya nyata Pemerintah Daerah dalam mendorong perbaikan pengelolaan keuangan dengan menjalankan dan menerapkan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik. Dan kabupaten/Kota juga mendapatkan penghargaan wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK-RI perwakilan Riau.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan menganalisis target APBD dan realisasinya. Oleh karena itu judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah “**Analisis Rasio Keuangan Pendapatan Provinsi Riau Tahun 2018-2021**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang tertulis dilatar belakang penelitian, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Riau jika dilihat dari Rasio kemandirian periode 2018-2021?
2. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Riau jika dilihat dari Rasio Efektivitas periode 2018-2021?
3. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Riau jika dilihat dari Rasio Efisiensi periode 2018-2021?
4. Bagaimana Perbandingan Rasio Keuangan Kabupaten Bengkalis dan Kota Pekanbaru periode 2018-2021?

## **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan indentifikasi masalah di atas maka perlu diadakan pembatasan masalah. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah berfokus pada Rasio keuangan yang terdiri dari analisis rasio kemandirian, analisis rasio efektivitas dan analisis rasio efisiensi yang di dapat dari data laporan keuangan Se-Provinsi Riau.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan pemerintah provinsi riau jika dilihat dari rasio kemandirian periode 2018-2021.
2. Mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan pemerintah provinsi riau jika dilihat dari rasio efektivitas periode 2018-2021.
3. Mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan pemerintah provinsi riau jika dilihat dari rasio efisiensi periode 2018-2021.

4. Mengetahui dan menganalisis perbandingan Rasio Keuangan Kabupaten Bengkalis dan Kota Pekanbaru periode 2018-2021.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Pemerintah Provinsi Riau  
Dari hasil penelitian merupakan masukan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah agar laporan keuangan di tahun berikutnya lebih baik lagi.
2. Bagi masyarakat  
Hasil penelitian ini di harapkan akan memberikan informasi yang berguna kepada masyarakat tentang kinerja anggaran dan juga laporan realisasi anggaran pendapatan daerah sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan dana masyarakat oleh pemerintah daerah.
3. Bagi penelitian selanjutnya  
Sebagai pembelajaran terutama bagi mahasiswa sebagai dasar perbandingan dalam rangka melakukan penelitian lebih lanjut pada bidang kajian ini.
4. Bagi peneliti  
Penelitian ini telah menjadi ruang belajar yang memiliki nilai positif dan sangat membantu dalam peningkatan kapasitas serta pengalaman penelitian berkaitan langsung dengan bidang akuntansi sektor publik.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan laporan skripsi ini secara garis besar terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini membuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini membahas tentang landasan teori berupa pengertian dan definisi yang di ambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi serta beberapa literature review yang berhubungan dengan penelitian.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini membahas tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

**BAB IV : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA**

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah di peroleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran penelitian

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**